

**BAB III**

**DINAMIKA *NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION'S*  
*PARTNERSHIP FOR PEACE* (NATO's PFP) DAN KEIKUTSERTAAN  
SWISS DALAM NATO's PFP**

Bab ini merupakan bab yang berisi mengenai sejarah pembentukan *Partnership for Peace* (PfP), struktur dan keanggotaan PfP, serta keikutsertaan Swiss dalam PfP. Secara singkat, *Partnership for Peace* (PfP) adalah salah satu program dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang dibentuk pada tahun 1994. PfP menawarkan program kerjasama antara NATO dan negara-negara mitra Euro-Atlantik, dimana mereka bebas untuk memilih prioritas kerjasama sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini kemudian menarik perhatian Swiss untuk ikut bergabung dalam program PfP, karena Swiss menyadari bahwa telah terjadi perubahan konstelasi dalam dunia internasional, sehingga Swiss harus beradaptasi untuk melindungi kedaulatan negaranya.

**A. Sejarah dan Dinamika *Partnership for Peace* (PfP)**

Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan dibubarkannya Pakta Warsawa, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara sebagai sebuah aliansi yang dibentuk oleh Amerika Serikat pada tahun 1949 bersama dengan 12 negara Eropa Barat menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan tujuan utama didirikannya NATO adalah untuk membendung sikap ekspansif atau bebas Uni

Soviet.<sup>1</sup> Sehingga ketika Uni Soviet runtuh, negara-negara yang tergabung dalam NATO sudah tidak mempunyai musuh bersama yang menyatukan mereka. Namun, Amerika Serikat sebagai pemimpin NATO berusaha untuk mempertahankan aliansi tersebut, dan pada akhirnya melakukan serangkaian adaptasi dengan mengubah strategi keamanannya sesuai dengan perubahan konstelasi dunia dunia, tetapi tetap kepada fungsi utamanya, yaitu memberikan jaminan keamanan bagi anggotanya.

Perubahan nyata NATO dimulai dengan Deklarasi London 1990, yang menyatakan bahwa aliansi tidak menganggap Uni Soviet dan Pakta Warsawa sebagai lawan dan mengundang mereka untuk menjalin hubungan diplomatik dengan NATO.<sup>2</sup> Kemudian pada pertemuan para kepala pemerintahan dan negara NATO di Roma bulan November 1991, NATO membuat suatu konsep yang disebut “*New Strategic Concept*”, dimana konsep ini menegaskan bahwa tujuan utama dari aliansi tetap *collective defence*.<sup>3</sup> Akan tetapi, sejak NATO tidak lagi menghadapi ancaman serangan militer dari Pakta Warsawa, maka masalah keamanan yang lain muncul, seperti masalah ekonomi, sosial, politik, konflik etnis, dan sengketa wilayah yang dihadapi oleh banyak negara di Eropa Tengah dan Timur. Selain itu, NATO juga mengidentifikasi masalah-masalah global seperti terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, dan teknologi rudal balistik. Sehingga untuk dapat menjangkau hal tersebut, NATO perlu untuk membuat sebuah inovasi baru. Mengikuti beberapa perubahan dalam

---

<sup>1</sup> *NATO handbook: Partnership and Cooperation*, Brussel: NATO office of Information Press, 2001, hlm. 11.

<sup>2</sup> Celeste A. Wallander, *Institutional Assets and Adaptability: NATO after the Cold War*, The IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology, 2000, hlm. 171.

<sup>3</sup> *Ibid.*

konsep NATO, maka diluncurkan program seperti *North Atlantic Cooperation Council* (NACC) pada tahun 1991 sebagai forum untuk memfasilitasi transisi struktur bipolar dan konfrontasi Eropa pada masa Perang Dingin menuju suatu pola kerjasama dan dialog antara anggota NATO dengan bekas anggota Pakta Warsawa (termasuk pecahan Uni Soviet)<sup>4</sup>, dan *Partnership for Peace* (PfP) pada tahun 1994 sebagai program kerjasama antara negara mitra individu Euro-Atlantik dan NATO untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di seluruh Eropa.

## 1. Sejarah terbentuknya PfP

Pada tahun 1991, melalui krisis di Yugoslavia dan peristiwa kudeta di Rusia, beberapa negara bekas Pakta Warsawa mulai menunjukkan keinginannya untuk ikut bergabung dengan NATO. Mereka percaya bahwa menjadi anggota NATO dengan memegang pada Artikel V<sup>5</sup> dapat melindungi mereka dari segala agresi Rusia yang akan datang. Kemudian, diskusi mengenai perluasan NATO pun terjadi di Washington. Pada bulan Oktober 1993, Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Les Aspin, memperkenalkan proposal PfP pada pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Travemünde, Jerman, Rencana ini dipahami sebagai sarana untuk menenangkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang mencari

---

<sup>4</sup> Ronald D. Asmus, dkk., *Can NATO Survive*, The Washington Quarterly, Vol. 19 No.2, Cambridge: Mit, 1996, hlm. 86.

<sup>5</sup> *The Washington Treaty Article V provides for collective defense against any armed aggression against one member would be considered an armed attack against all members. This assurance, given the overwhelming capabilities of the military forces of the United States, is greatly desired by member states and those aspiring to become members.*

keanggotaan NATO dan Rusia yang khawatir ditinggalkan dalam keterpurukan. Proposal ini menawarkan kerjasama militer yang besar dengan NATO, tetapi tidak dengan keanggotaan, dan terbuka untuk semua negara anggota NACC<sup>6</sup> dan CSCE<sup>7</sup>.

Pada KTT Dewan Atlantik Utara di Brussels, Belgium 10-11 Januari 1994, NATO memperkenalkan *Partnership for Peace* (PfP) dengan menyatakan,

*“We have decided to launch an immediate and practical programme that will transform the relationship between NATO and participating states. This new programme goes beyond dialogue and co-operation to forge a real partnership: a Partnership for Peace (PfP).”*<sup>8</sup>

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh program PfP adalah untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di seluruh Eropa. Setelah diluncurkan, NATO mengundang semua negara yang tergabung dalam NACC dan CSCE yang mampu dan bersedia untuk berkontribusi dalam program ini. Sejak program ini diluncurkan, PfP telah berkembang menjadi sebuah komponen dasar keamanan di kawasan Euro-Atlantik dan menempati peran pusat dalam NATO.

PfP merupakan program kerjasama bilateral praktis antara NATO dan negara mitra individu Euro-Atlantik berdasarkan kemampuan dan

---

<sup>6</sup> NACC digantikan oleh *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) pada Mei 1997. EAPC memiliki 46 Negara anggota.

<sup>7</sup> CSCE menjadi *Organization on Security and Cooperation in Europe* (OSCE) pada awal tahun 1995. OSCE memiliki 55 Negara anggota, terdiri dari semua negara Eropa termasuk Amerika Serikat dan Kanada.

<sup>8</sup> Yuksel Inan dan Islam Yusuf, *Partnership for Peace*, Volume IV, Number 2, 1999, hlm. 1.

kepentingan negara mitra tersebut. Program PfP sendiri berfokus pada kerjasama melalui *operational role*, termasuk keikutsertaan dalam operasi *peacekeeping*, *crisis management* dan kemanusiaan, serta menyediakan dialog dan kerjasama untuk menjalin kemitraan yang lebih nyata. Program ini kemudian membantu untuk memperluas dan mengintensifkan kerjasama politik dan militer di seluruh Eropa, serta meningkatkan stabilitas untuk mengurangi ancaman yang mempengaruhi perdamaian dan memperkuat hubungan keamanan berdasarkan pada kerjasama praktis dan komitmen prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung Aliansi.<sup>9</sup> Selain itu, NATO juga akan melakukan konsultasi dengan mitra aktif jika mitra tersebut merasakan ancaman langsung pada integritas teritorial, kebebasan politik, atau keamanan.

## 2. Tujuan PfP

PfP sebagai program kerjasama NATO mempunyai tujuan yang dijabarkan dalam Kerangka Dokumen (*the Framework Document*) yang telah ditandatangani oleh setiap negara saat mereka bergabung. Kerangka Dokumen ini mencakup usaha tertentu yang akan dibuat oleh setiap negara untuk bekerja sama dengan NATO dalam memenuhi tujuan dari program secara keseluruhan, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Untuk memfasilitasi transparansi dalam perencanaan pertahanan nasional dan proses penganggaran,

---

<sup>9</sup> *NATO handbook: Partnership and Cooperation*, op. cit., hlm. 17.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 68.

- b. Untuk memastikan kontrol demokratis dari pasukan pertahanan,
- c. Untuk mempertahankan kapabilitas dan kesiapan untuk berkontribusi dalam operasi di bawah otoritas PBB dan/atau tanggung jawab OSCE,
- d. Untuk mengembangkan hubungan kerjasama militer dengan NATO, untuk tujuan perencanaan bersama, pelatihan dan latihan, dalam rangka memperkuat kemampuan peserta PfP untuk melakukan misi di bidang perdamaian, pencarian dan penyelamatan, operasi kemanusiaan, dan lain-lain yang kemudian telah disetujui,
- e. Untuk mengembangkan, dalam jangka panjang, kekuatan yang lebih mampu untuk beroperasi dengan orang-orang dari anggota NATO.

Dalam Kerangka Dokumen juga menyatakan bahwa partisipasi yang aktif dalam PfP akan memainkan peran yang sangat penting dalam proses perkembangan, termasuk anggota baru dalam NATO.

### **3. Struktur dan Keanggotaan PfP**

Seriap negara yang menginginkan untuk bergabung dalam PfP akan diundang dan berkewajiban untuk menandatangani Kerangka Dokumen terlebih dahulu. Kerangka Dokumen ini berfungsi untuk menggambarkan tujuan dan prinsip-prinsip dasar pembentukan PfP. Berdasarkan tanda tangan tersebut, negara mitra menegaskan kembali komitmen politik

mereka terhadap kelestarian masyarakat demokratis dan pemeliharaan prinsip-prinsip hukum internasional. Negara mitra juga memastikan kembali komitmen mereka untuk memenuhi itikad baik Piagam PBB dan prinsip-prinsip *Universal Declaration on Human Rights*, yaitu<sup>11</sup>:

- a. Untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun,
- b. Untuk menghormati perbatasan yang ada, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.

Selain itu, negara juga harus menegaskan kembali komitmen mereka kepada *Helsinki Final Act* dan semua dokumen CSCE/OSCE, serta memenuhi komitmen dan kewajiban yang telah dilakukan di bidang *disarmament* dan *arms control*.<sup>12</sup>

Setelah menandatangani Kerangka Dokumen, langkah selanjutnya adalah setiap negara mitra berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Presentasi (*Presentation Document*) kepada NATO. Dokumen Presentasi menunjukkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan politik dari PfP, militer dan aset lainnya yang negara mitra inginkan/bermaksud membuatnya ada demi tujuan PfP, dan kerjasama di daerah tertentu yang diinginkan oleh negara mitra untuk dicapai bersama dengan NATO.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 69.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dalam Pfp sendiri terdapat beberapa struktur yang membantu terwujudnya kerjasama yang lebih baik antara NATO dan negara mitra, struktur tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Individual Partnership Programme (IPP)*<sup>14</sup>

IPP atau Program Kemitraan Individual merupakan usulan dan tambahan dari NATO dengan masing-masing negara mitra yang dikembangkan dan disepakati secara bersama-sama. IPP mencakup periode selama dua tahun. IPP berisi pernyataan dari tujuan politik negara mitra dalam Pfp, militer dan aset lainnya yang akan dibuat ada untuk tujuan Pfp, kerjasama yang luas antara NATO dan negara mitra di berbagai bidang, dan kegiatan khusus yang akan dilaksanakan di masing-masing area kerjasama yang termasuk dalam IPP.

b. *Partnership Work Programme (PWP)*

Pemilihan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing negara mitra secara terpisah, atas dasar kebutuhan dan prioritas, terkandung dalam PWP atau Program Kerja Mitra. PWP merupakan aspek penting dalam Pfp yang mengakui bahwa kebutuhan dan situasi masing-masing negara mitra bervariasi, sehingga mereka akan mengidentifikasi sendiri bentuk kegiatan dan kerjasama yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Program Kerja berisi deskripsi luas dari berbagai area

---

<sup>14</sup> IPP kemudian diganti menjadi *Individual Partnership and Cooperation Programme (IPCP)*.



kemungkinan kerjasama dan daftar kegiatan yang tersedia untuk masing-masing daerah. PWP dipersiapkan dengan keterlibatan penuh dari negara mitra. PWP mencakup waktu dua tahun dan ditinjau setiap tahun.

c. *The Partnership for Peace Planning and Review Process (PARP)*

Untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama, NATO dan negara-negara mitra memutuskan untuk mengesahkan PARP dalam PFP berdasarkan lingkaran perencanaan dua tahunan, dimulai pada Januari 1995, dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan meningkatkan transparansi di antara NATO dan negara-negara mitra. Pada pertemuan mereka Desember 1991, Menteri pertahanan NATO menekankan pentingnya proses ini untuk mewujudkan dua tujuan PFP, yaitu kerjasama yang lebih dekat dan transparansi dalam perencanaan pertahanan nasional dan penganggaran.

d. *Political-Military Steering Committee on Partnership for Peace (PMSC/PfP)*

PMSC adalah badan kerja dasar dengan tanggungjawab untuk urusan PFP, yang mana akan bertemu dengan berbagai macam konfigurasi dengan NATO atau dengan NATO dan negara mitra. Tanggungjawab utama yang dimiliki oleh PMSC adalah menasehati Dewan Atlantik Utara (NAC) sehubungan dengan pertanyaan PFP;

bertanggungjawab atas keseluruhan koordinasi dari PWP; mengembangkan pedoman politik-militer untuk digunakan oleh *NATO Military Authorities* untuk persiapan masukan mereka ke PWP sehubungan dengan latihan dan kegiatan militer; menyediakan bimbingan untuk persiapan IPP, dan mengirimkan IPP kepada NAC untuk disetujui; dan mengembangkan dan mengkoordinasi kerja dalam kaitannya dengan PARP. Partisipasi negara mitra dalam PARP bersifat sukarela.

e. *Partnership Coordination Cell (PCC)*

PCC adalah salah satu badan kerja dasar PFP yang bermarkas di Mons, Belgium, dimana *Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)* juga berada. PCC didirikan di bawah otoritas NAC. Tugas dari PCC adalah mengkoordinasikan kegiatan militer bersama dalam PFP, dan untuk melaksanakan rencana militer diperlukan untuk menerapkan aspek militer dari PWP, terutama sehubungan dengan latihan dan kegiatan terkait lainnya, seperti *peacekeeping*, operasi kemanusiaan, pencarian, dan penyelamatan. PCC juga berpartisipasi dalam evaluasi kegiatan militer tersebut.

#### **4. Dinamika PFP sebagai Program Kerjasama NATO**

PFP sebagai program kerjasama dapat dikatakan telah sukses dalam mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Eropa dan mendorong hubungan

yang baik dengan negara-negara tetangga. Kesuksesan ini akhirnya membawa NATO pada tahun 1997 untuk meningkatkan peran PfP. Pada pertemuan Madrid 1997, NATO meluncurkan berbagai langkah-langkah tambahan yang menambah kualitas PfP, termasuk memperkuat dalam bidang politik, keamanan, dan militer. Kemudian *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) dibentuk untuk menggantikan NACC. Selain itu, peningkatan program PfP akan lebih memiliki peran operasional, konsultasi politik yang lebih kuat dan meningkatkan kesempatan bagi negara mitra untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan PfP.

Selanjutnya pada Pertemuan Washington, April 1999, tiga anggota PfP memutuskan untuk bergabung dalam NATO, yaitu Czech Republic, Hungaria, dan Polandia. Kemudian, peran PfP semakin ditingkatkan dan peran operasional semakin diperkuat, termasuk pengenalan terhadap; (1) *the Operational Capabilities Concept* (OCC) untuk meningkatkan kemampuan NATO dan negara mitra untuk beroperasi bersama dalam operasi di bawah NATO; (2) *the Political-Military Framework* untuk keterlibatan negara mitra dalam konsultasi politik dan pembuatan keputusan, dalam rencana operasional dan dalam pengaturan perintah; (3) *a Training and Education Enhancement Programme* untuk membantu memperkuat kapabilitas operasional negara-negara mitra.

## **B. Keikutsertaan Swiss dalam *Partnership for Peace* (PfP)**

Menurut *Neutrality Report* tahun 1993, netralitas sendiri tidak dapat melindungi negara dari masalah-masalah baru seperti, terorisme, kejahatan terorganisir dan kerusakan lingkungan. *Report 93* juga menjelaskan 5 tujuan utama yang harus dicapai oleh Swiss, yaitu: (1) perdamaian dan keamanan, (2) hak asasi manusia, demokrasi, dan peraturan hukum, (3) *economic welfare*, (4) keadilan sosial dan (5) lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Swiss harus mengubah arah kebijakannya. Sejauh ini netralitas telah menjadi instrumen utama dalam kebijakan luar negeri Swiss, dan kemerdekaan merupakan tujuan utama. Setelah publikasi mengenai *Report 93*, hal ini semakin jelas bahwa Swiss harus merevisi kembali netralitas dan kebijakan keamanannya.

Pada tahun 1993, ketika Amerika Serikat mengenalkan ide mengenai PfP, Swiss adalah satu negara pertama yang menunjukkan ketertarikannya.<sup>15</sup> Setelah akhirnya PfP diluncurkan dan Kerangka Dokumen disampaikan pada Januari 1994, Dewan Federal merumuskan kondisi dasar untuk kemungkinan berpartisipasi, dimana Swiss tetap mempertahankan netralitasnya, tidak akan mempertimbangkan masuk dalam NATO, dan pengecualian untuk berpartisipasi dalam latihan militer untuk karakter bertahan. Pada Maret 1994, delegasi NATO menyampaikan PfP di Bern dan Sekretaris Amerika Serikat,

---

<sup>15</sup> Peter Candidus Stocker, *op. cit.*, hlm. 69.

Warren Christopher, mengajak Swiss untuk berpartisipasi dalam PfP sebagai model negara yang stabil dan netral.<sup>16</sup>

Kemudian pada tanggal 12 Juni 1994, warga Swiss memberikan respon negatif terhadap pemungutan suara *blue helmets* dengan 57,2% suara<sup>17</sup>, dan dengan demikian menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kontribusi militer oleh Swiss untuk *peacekeeping operations* PBB dan OSCE. Hal ini kemudian berdampak pada sikap ragu-ragu Dewan Federal untuk memajukan ide berpartisipasi dalam PfP kepada warga Swiss, sehingga Dewan Federal akhirnya membentuk kelompok kerja untuk menganalisis kemungkinan Swiss dalam PfP. Pada akhirnya, kelompok kerja tersebut sampai pada kesimpulan bahwa partisipasi Swiss dalam PfP tidak berentangan dengan netralitas Swiss dan dapat membantu Swiss untuk mewujudkan kebijakan keamanannya. Pada bulan Januari 1995, berdasarkan hasil dari kelompok kerja, Dewan Federal kembali berdiskusi dalam pertemuan mengenai kemungkinan Swiss untuk berpartisipasi dalam PfP, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan yang dibuat. Alasan untuk menunda keputusan partisipasi Swiss bukan terletak pada isi PfP, tetapi terkait pertimbangan urusan dalam negeri, dimana Dewan Federal masih menganggap bahwa penolakan sebelumnya mengenai UN dan OSCE dapat mempengaruhi sikap warga Swiss terhadap PfP. Akan tetapi, pada Februari 1995, Austria memutuskan untuk berpartisipasi dalam PfP, dan topik tersebut mendapat perhatian lebih dalam pers Swiss.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm, 70.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Komitmen NATO di Bosnia-Herzegovina memainkan peran penting bagi Swiss. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Dayton, Dewan Federal mengizinkan NATO untuk mengangkut personel dan material melalui jalan dan jalur udara melalui Swiss ke Bosnia-Herzegovina. Mengenai netralitas, pemerintah Swiss menyatakan bahwa hal ini tidak bermasalah, karena semua pihak yang terlibat konflik telah menandatangani perjanjian damai. Atas permintaan NATO, Swiss menyiapkan diri untuk siap menawarkan spesialis dari medis, insinyur dan penyelamatan tentara. Namun, karena tentara harus bersenjata untuk pertahanan diri, Dewan Federal harus menarik kembali tawaran tersebut karena hukum militer Swiss. Terkait hal tersebut, Swiss akhirnya memutuskan untuk mendukung misi OSCE dengan mengirimkan *Yello Berets* (tidak bersenjata) untuk menyediakan unit logistic, teknik, dan bantuan medis ke Bosnia-Herzegovina. Langkah ini kemudian mendapatkan dukungan dari partai politik dan warga Swiss. Pada akhirnya, Pemerintah Swiss mendapat sinyal untuk maju dengan keputusan untuk partisipasi PFP.

Selama kunjungan Menteri Pertahanan Amerika William Perry, pada 2 Februari 1996 di Bern, Penasihat Federal Ogi, Menteri Pertahanan, berjanji akan memberikan keputusan sebelum akhir 1996.<sup>18</sup> Individual dalam parlemen mewajibkan bahwa parlemen dan warga yang harus memutuskan tentang PFP. Akan tetapi, Dewan Federal tidak setuju dengan permintaan untuk menyerahkan keputusan kepada parlemen atau warga, karena hal ini bersangkutan dengan inisiatif politik tanpa kewajiban hukum internasional dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 72.

tanpa perubahan kebijakan netralitas, dan karena itu konstitusional berada di bawah Dewan Federal.<sup>19</sup> Menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Dewan Federal, sempat muncul kritikan yang menuduh bahwa Pemerintah Swiss telah mendorong topik ini menjadi topik utama. Namun pada akhirnya, Parlemen mengatakan “iya” untuk prosedur Dewan Federal.

Pada akhir Oktober 1996, Dewan Federal memutuskan untuk bergabung dalam *Partnership for Peace* (PfP) untuk membantu mencapai tujuan kebijakan keamanan dengan memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan di Eropa. Setelah hampir tiga tahun sejak undangan dari NATO, Swiss melalui Menteri Luar Negeri Flavio Cotti, akhirnya menandatangani Kerangka Dokumen PfP pada 11 Desember 1996 di Brussels.<sup>20</sup>

### **1. Proses Swiss menjadi Anggota PfP**

Sesuai dengan ketentuan untuk menjadi anggota PfP, maka setiap negara mitra harus menandatangani Kerangka Dokumen terlebih dahulu dan kemudian menyerahkan Dokumen Presentasi. Ketentuan tersebut juga dilakukan oleh Swiss untuk menjadi bagian dari PfP. Swiss menyerahkan Dokumen Presentasi kepada NATO yang mengandung tujuan yang mendasari bergabungnya Swiss dalam PfP. Swiss juga menegaskan kembali bahwa mendukung prinsip-prinsip dasar PfP dibentuk yaitu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Heiko Borchert, *Switzerland and Europe's Security Architecture: The Rocky Road from Isolation to Cooperation*, 1999, hlm. 145.

stabilitas dan keamanan di Eropa, perlindungan dasar dan HAM, dan demokrasi. Pada akhirnya partisipasi Swiss sepenuhnya sejalan dengan kebijakan luar negeri dan sesuai dengan misi untuk berkontribusi dalam perdamaian, urusan sipil, pencegahan perang, dan pertahanan.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya netralitas Swiss, terkait dengan kewajiban tradisional Swiss dari masa lalu hingga sekarang. Maka, Dewan Federal menuliskan dalam Dokumen Presentasi bahwa:

*“Switzerland is committed to permanent and armed neutrality. It has no intention to abandon its neutrality and does not desire to become member of the North Atlantic Treaty Organization. Switzerland's decision to participate in the Partnership for Peace is based on the desire to expand its co-operation for the promotion of security and peace with partner states, along the lines and in the spirit of its traditional policy of good offices and complementary to its engagement in the OSCE and in the Council of Europe. This decision is based on the recognition that such a participation in the Partnership for Peace is unreservedly compatible with Swiss neutrality.”<sup>22</sup>*

Pernyataan ini menjelaskan bahwa Swiss berkomitmen untuk menjadi negara yang netral. Swiss juga tidak berniat untuk meninggalkan netralitasnya dan bergabung dalam NATO. Selain itu, keputusan Swiss untuk bergabung dalam PfP adalah didasarkan pada keinginan untuk memperluas kerjasama untuk mempromosikan keamanan dan perdamaian dengan negara-negara mitra. Keputusan Swiss untuk bergabung dalam PfP juga menunjukkan bahwa PfP kompatibel dengan netralitas Swiss.

---

<sup>21</sup> The Federal Council, “*Presentation Document of Switzerland for the Partnership for Peace*”, diakses dari <http://www.nato.int/PfP/docu/p961217a.htm>, pada tanggal 25 April 2015.

<sup>22</sup> *Ibid.*



Mengenai netralitas Swiss dan kedaulatan, Dewan Federal menuliskan pada halaman yang sama bahwa:

*“The participation or non-participation in all activities within the Partnership is subject to the sovereign decision of each individual partner. If the Partnership for Peace should - contrary to the documents on which it is based - assume an alliance-like character, Switzerland would have to reserve the option to terminate its participation in the Partnership in order to safeguard the integrity of its neutrality.”<sup>23</sup>*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan atau tidak dalam kegiatan yang ada di PfP merupakan keputusan kedaulatan masing-masing individu, dan apabila PfP menyalahi isi dari dokumen tersebut, maka Swiss akan mengakhiri keikutsertaannya dalam PfP untuk menjaga integritas netralitasnya.

Adapun prioritas Swiss untuk bergabung dalam PfP, dimana Swiss memiliki pengalaman dan keahlian, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Demokratis kontrol atas angkatan bersenjata, kerjasama militer, angkatan bersenjata terdiri dari lebih dari satu kelompok bahasa, menghormati hak-hak minoritas dan struktur federal;
- b. Pelatihan hukum internasional kemanusiaan (terutama konvensi Jenewa dan protokol tambahan mereka), penyebaran dan penguatan, khususnya dengan mendorong pemenuhan kewajiban ini;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

- c. Pelatihan dalam kebijakan keamanan untuk perwira militer, diplomat dan pegawai negeri sipil dari kementerian luar negeri dan pertahanan;
- d. Pembentukan kelompok ahli di beberapa bidang pilihan yang relevan dengan kebijakan keamanan;
- e. Pelatihan pengamat militer;
- f. Pelatihan logistik untuk operasi penjaga perdamaian;
- g. Pelayanan medis, pencarian dan penyelamatan;
- h. Promosi arus informasi yang bebas;
- i. Akses ke keahlian laboratorium perlindungan nuklir dan kimia angkatan bersenjata Swiss.

Selanjutnya, Dewan Federal menginginkan untuk fokus pada program kegiatan pelatihan, seminar, konferensi, dan pertukaran informasi di daerah-daerah tersebut.

Terkait dengan latihan militer, Dewan Federal membuat satu pengecualian, yaitu:

*“Switzerland is interested to send observers to some activities in which it might decide not to take part. It entertains the expectation that participation in partnership activities will also provide it with a better understanding of the work of international staffs. With respect to exercises the interest of Switzerland is focused on the military dimension of disaster relief, medical services, search and rescue. Switzerland excludes an active participation with troop units in field exercises with a collective defence thrust. All activities*

*in which Switzerland takes part must be compatible with her neutrality.*"<sup>25</sup>

Pernyataan tersebut sekali lagi menegaskan bahwa Swiss hanya akan mengambil kegiatan yang kompatibel dengan netralitasnya. Melihat Dokumen Presentasi Swiss, terlihat jelas bahwa Swiss tetap menjaga *good office* dan netralitasnya. Pertimbangan hingga akhirnya dapat memenuhi standar Swiss inilah yang membuat Swiss baru dapat bergabung dalam Pfp pada tahun 1996.

## **2. Dinamika Keterlibatan Swiss dalam Pfp**

Tahun 1999 merupakan tahun yang penting bagi partisipasi Swiss dalam Pfp. Tepatnya pada bulan Juni 1999, terjadi peningkatan konflik antara Serbia dan Albania di Kosovo. Pembantaian pun terjadi yang menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa harus mengungsi terutama Kosovo-Albania. Bagi Swiss, pelanggaran hak asasi manusia di Kosovo sudah tidak dapat diterima. Sehingga Swiss memutuskan untuk berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian militer yang dipimpin oleh NATO. Dengan mengirimkan sebuah *company* yang dikenal sebagai "*Swisscoy*" ke Kosovo. Bekerja di bawah mandate UN, Swiss mengambil bagian dalam KFOR dengan membantu untuk membangun kembali Kosovo di samping kegiatan menjaga perdamaian. *Swisscoy* menyediakan dukungan logistik termasuk pemurnian air, transportasi khusus,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

perlengkapan medis dan kesehatan, serta pasokan bahan bakar. Kendaraan lapis baja Swisscoy menyediakan perlindungan dan helicopter Swiss Super Puma digunakan untuk tugas transportasi udara. Pasukan Swisscoy, semua relawan, dipersenjatai dan berhak untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka menerima pelatihan khusus sebelum terjun dalam bertugas dan dirotasi setiap enam bulan. Selain itu, Swiss memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan Kosovo melalui program bilateral dan multilateral.

Kemudian dari Februari 2004 sampai Februari 2007, sejumlah staf perwira Swiss bergabung dengan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di Afganistan. Mereka menyediakan ahli dan bantuan untuk meningkatkan kontak dengan para pemimpin lokal dalam Tim Rekonstruksi Provinsi yang dipimpin Jerman di Provinsi Kunduz. Swiss juga telah menyediakan sejumlah kapabilitas militer dan sipil untuk operasi dukungan perdamaian di bawah mandate UN atau OSCE. Disisi lain, Swiss telah menyatakan sejumlah fasilitas pelatihan yang tersedia untuk kegiatan pelatihan PfP. Ini termasuk Pusat Pelatihan Informasi dan Komunikasi di Angkatan Bersenjata Swiss di Berne; pusat pelatihan gunung Angkatan Bersenjata Swiss di Andermatt; pusat pelatihan internasional dari Swiss Army (SWISSINT) di Stans, yang telah disertifikasi sebagai Training Kemitraan dan Pusat Pendidikan; dan Taktis Training Centre di Pusat Pelatihan Petugas Swiss 'di Lucerne.

Swiss juga mempromosikan penerapan hukum pada konflik bersenjata dan hukum kemanusiaan. Baru-baru ini, Swiss telah mengambil peran utama dalam mempromosikan standar internasional untuk pengaturan perusahaan keamanan swasta.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa PfP merupakan program kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Eropa. PfP menawarkan kerjasama dengan NATO secara individu dan sesuai dengan prioritas, serta kebutuhan masing-masing negara mitra. Selain itu, meskipun PfP merupakan program kerjasama dari NATO, negara yang ingin bergabung dalam PfP tidak harus menjadi anggota NATO. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian Swiss sebagai negara netral untuk bergabung dalam PfP. Kondisi konstelasi dunia yang berubah dan keluarnya laporan netralitas tahun 1993, membuat Swiss sadar bahwa mereka harus merevisi kembali netralitasnya dan melindungi kedaulatan negaranya.

Setelah dilakukan pertimbangan selama kurang dari tiga tahun, Swiss akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam PfP. Bergabungnya Swiss dalam PfP dianggap oleh pemerintahan Swiss merupakan keputusan yang menguntungkan bagi Swiss. Disatu sisi Swiss tetap dapat mempertahankan kebijakan tradisionalnya yaitu netralitas, dan dapat mewujudkan kebijakan luar negerinya, terutama dalam bidang keamanan.